

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KATA PENGANTAR

Renja adalah pedoman bagi suatu Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menginstruksikan kepada setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun rencana kerja yang menggambarkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta memaparkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam satu periode tahun anggaran dan capaian terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai wujud kinerja satuan kerja instansi pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 adalah dokumen Inspektorat Daerah yang berisi program dan kegiatan prioritas yang mempunyai kedudukan penting yang menjembatani antara Perencanaan Strategis (Renstra) jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam Rancangan Renja ini akan dijabarkan berapa besaran tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi melalui program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dengan indikator-indikator yaitu: Masukan (input), Keluaran (output), hasil (outcomes), dampak (impact) dan keuntungan (benefit).

Selanjutnya Perubahan Renja ini menjadi pedoman penyusunan Anggaran Belanja Inspektorat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025 yang akan dibahas dalam sidang paripurna antara Eksekutif dan Legislatif seterusnya disahkan sebagai APBD dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) sebagai Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah di Tahun 2025.

Semoga Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini yang merupakan tahun ke tiga (3) dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah dalam mencapai visi dan misinya dapat mewujudkan Akuntabilitas Kinerja yang dapat terukur (measureable) dan

terpertanggungjawabkan (responsiable) serta dapat bermanfaat bagi seluruh jajaran pelaksana tugas, mitra kerja serta segenap masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sampai dengan TW II	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan TW II Tahun 2025	8
Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	13
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi	13
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	13
3.3 Program dan Kegiatan	19
Bab V Penutup.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah merupakan institusi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, memiliki peran penting dalam mewujudkan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara **“Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”**.

Untuk mencapai Tujuan tersebut, maka perlu ditetapkan rencana kerja yang mendukung terwujudnya Tujuan tersebut. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, maka diharapkan seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

Pengertian ringkas Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 yaitu : Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disingkat Renja Inspektorat adalah dokumen

perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 yang mana merupakan dokumen rencana yang memuat program, kegiatan, dan subkegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang..... Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah dengan tahapan sebagai berikut :

1. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA untuk diverifikasi.
2. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

1. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
2. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 ayat (3).
3. Penyusunan Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. rancangan akhir Perubahan Renja
4. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
5. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

6. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (1).
7. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
8. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
9. Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah.
10. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA.
11. Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

1. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
2. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2013 nomor 440, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 16);

9. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2025;
10. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (P RKPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025.
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah :

1. Menjadi kerangka acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Inspektorat Kabupaten padang Lawas Utara pada tahun berjalan
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya (termasuk anggaran) untuk mencapai sasaran Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat
3. Menyesuaikan Program dan kegiatan Inspektorat daerah dan arah kebijakan dan tema Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPD2024-2026 dan RKPD 2025 Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. Sebagai Pedoman Penyusunan Perubahan RKA dan Perubahan DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara sehingga Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lebih Terarah;
2. Menjadi salah satu Onstrumen penting untuk mengevaluasi capaian kinerja OPD, memastikan apakah Program/ Kegiatan telah sesuai dengan target dan capaian sasaran yang diharapkan;
3. Memastikan adanya keterkaitan dan konsistensi antara tahapan perencanaan (RENJA), Penganggaran (RKA,KUA PPAS), Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara keseluruhan.

1.4 Sistematika Penyusunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPD, dan RKPD maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kota Binjai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturandaerah, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar bab per bab.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TW II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 2025 dan Capaian Renstra Inspektorat Sampai dengan Triwulan II .

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3 Program dan Kegiatan

BAB V. P E N U T U P

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA SAMPAI DENGAN TW II

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis tahun 2024-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja. Penetapan Indikator kinerja kegiatan berdasarkan kepada kelompok masukan (*infut*), keluaran (*Outfut*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja tahun 2024. Adapun Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja disesuaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana program, kegiatan dan sub kegiatan sudah ditentukan oleh kegiatan ini.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025 telah dianggarkan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah kabupaten Padang Lawas Utara, dalam APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 sebesar Rp. 7.068.945.278,- namun dengan adanya pergeseran di bulan Februari tahun 2025 Anggaran Inspektorat menjadi Rp. 4.413.001.028,- dengan serapan Anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2025 sebesar Rp. 2.573.339.934,- atau sebesar 58,31 %.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra Inspektorat Daerah.

Pelaksanaan Program/ kegiatan pada Inspektorat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum sudah memenuhi target kinerja yang ditetapkan meskipun belum optimal, mengingat keterbatasan yang ada terutama dalam hal pendanaan. Untuk itu perlu ditentukan program/kegiatan prioritas berdasarkan pembobotan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, kemendesakan, efesiensi, dan efektivitas serta permendagri no 15 tahun 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Matrik hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Pada Inspektorat daerah kabupaten Padang Lawas Utara sampai dengan Triwulan II tahun 2025 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Evaluasi Renja Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2025
Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Sasaran	Kode	Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2024- 2029		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD 2024		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Padang Lawas Utara Tahun 2025		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten Padang Lawas Utara 2024 s/d Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 =7+13	1500,00%										
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																								
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN																								
1	Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Persepsi Korupsi	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Peningkatan Sistem Pengendalian Evaluasi Kinerja		0	386.727.000		399.090.100	2	15.993.500	-	57.186.560	-	-	-	-	2	73.180.060	60	459.907.060	31,25%	31,83%	
1.1			Perumusan Kebijakan Tekhnis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terlaksannnya Kegiatan Kebijakan Tekhnis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			244.009.000		10.499.400	1	6.316.500	-	-	-	-	-	-	1	6.316.500	4	250.325.500	50,00%	49,57%	
1.2.1			Perumusan Kebijakan Tekhnis di bidang Pengawasan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis bidang Pengawasan		3	244.009.000	1	4.127.600	1	-							1	-	4	244.009.000	100,00%	0,00%	
1.2.2				Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis bidang Fasilitasi Pengawasan				2	6.371.800		6.316.500							-	6.316.500	-	6.316.500	0,00%	99,13%	
1.1		6.01.03.1	Pendampingan Dan Asistensi	Jumlah Pendampingan Dan Asistensi Yang Dilaksanakan		55	142.718.000		388.590.700	1	9.677.000	-	57.186.560	-	-	-	-	1	66.863.560	56	209.581.560	12,50%	14,09%	
1.1.1			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		25	89.503.000	30	145.297.900				43.461.300					-	43.461.300	25	132.964.300	0,00%	29,91%	
1.1.2		6.01.03.1.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		25	17.250.000	22	96.808.600				8.921.760					-	8.921.760	25	26.171.760	0,00%	9,22%	
1.1.3			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		5	35.965.000	2	89.593.400	1	9.677.000		3.119.500					1	12.796.500	6	48.761.500	50,00%	14,28%	
1.1.4			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		0	0	1	56.890.800				1.684.000					-	1.684.000	-	1.684.000	0,00%	2,96%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																		Predikat Kinerja						

1	Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Peningkatan Fungsi Pengawasan			0	751.590.300		982.187.600	63	175.175.800	-	98.596.000	-	-	-	-	63	273.771.800	175	1.025.362.100	17,00%	18,80%
1,1		6.01.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			52	249.591.000		260.463.300	14	73.650.000	-	-	-	-	-	-	14	73.650.000	66	323.241.000	17,50%	14,92%
1.1.1			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani			2	10.228.000	2	13.584.100								-	-	2	10.228.000	0,00%	0,00%	
1.1.2			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			50	239.363.000	40	246.879.200	14	73.650.000							14	73.650.000	64	313.013.000	35,00%	29,83%
1,2		6.01.02.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal			60	501.999.300		721.724.300	49	101.525.800	-	98.596.000	-	-	-	-	49	200.121.800	109	702.121.100	16,51%	22,68%
1.2.1			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			7	58.627.600	7	59.068.500								-	-	7	58.627.600	0,00%	0,00%	
1.2.2			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			4	53.713.400	53	149.640.300	48	83.778.000							48	83.778.000	52	137.491.400	90,57%	55,99%
1.2.3			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja			10	75.400.400	8	81.427.100				8.623.000				-	8.623.000	10	84.023.400	0,00%	10,59%	
1.2.4		6.01.02.1.4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan			8	73.000.400	8	90.264.700				12.922.000				-	12.922.000	8	85.922.400	0,00%	14,32%	
1.2.5		6.01.02.1.5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa			20	87.638.600	20	124.881.900				41.428.200				-	41.428.200	20	129.066.800	0,00%	33,17%	
1.2.6		6.01.02.1.6	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk			3	45.857.800	3	81.658.300				10.500.000				-	10.500.000	3	56.357.800	0,00%	12,86%	
1.2.7			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			8	107.761.100	4	134.783.500	1	17.747.800		25.122.800				1	42.870.600	9	150.631.700	25,00%	31,81%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																								
Predikat Kinerja																								
1	Terwujudnya Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN Dengan Indikator Pembangunan Yakni Indeks Persepsi Korupsi	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota			178	784.500.921		999.409.700	19	115.630.065	-	284.490.765	-	-	-	-	19	400.120.830	197	1.184.621.751	32,14%	51,47%
1,1		6.01.01.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			1	2.660.000		2.979.000	1	2.957.000	-	-	-	-	-	-	1	2.957.000	2	5.617.000	100,00%	99,26%
1.1.1		6.01.01.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			1	2.660.000	1	2.979.000	1	2.957.000							1	2.957.000	2	5.617.000	100,00%	99,26%
1,2		6.01.01.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1	12.366.401		375.640.000	-	-	-	170.000.000	-	-	-	-	-	170.000.000	1	182.366.401	0,00%	45,26%
1.2.1		6.01.01.4.1	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			1	12.366.401	57	375.640.000				170.000.000				-	170.000.000	1	182.366.401	0,00%	45,26%	

1,3		6.01.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah			13	31.284.500		31.897.700	1	3.075.500	-	-	-	-	-	1	3.075.500	14	34.360.000	50,00%	49,64%
1.3.1		6.01.01.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	3.324.500	1	3.097.700	1	3.075.500						1	3.075.500	2	6.400.000	100,00%	99,28%
1.3.2		6.01.01.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12	27.960.000	12	28.800.000							-	-	12	27.960.000	0,00%	0,00%	
1,4		6.01.01.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			96	353.741.474		161.563.200	14	33.044.100	-	54.628.200	-	-	-	14	87.672.300	110	441.413.774	8,33%	47,77%
1.4.1		6.01.01.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			3	3.915.000	3	5.468.000				2.690.000			-	2.690.000	3	6.605.000	0,00%	49,20%	
1.4.2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			49	32.041.500	40	20.315.800				6.782.000			-	6.782.000	49	38.823.500	0,00%	33,38%	
1.4.3		6.01.01.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			6	15.706.900	6	7.584.600				3.749.000			-	3.749.000	6	19.455.900	0,00%	49,43%	
1.4.4			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2	18.629.100	3	18.050.000				8.374.000			-	8.374.000	2	27.003.100	0,00%	46,39%	
1.4.5			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			6	34.103.200	44	29.760.000				6.502.500			-	6.502.500	6	40.605.700	0,00%	21,85%	
1.4.6		6.01.01.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			3	21.720.000	3	24.090.000				11.910.000			-	11.910.000	3	33.630.000	0,00%	49,44%	
1.4.7			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			27	227.625.774	24	56.294.800	14	33.044.100		14.620.700				14	47.664.800	41	275.290.574	58,33%	84,67%
1,5		6.01.01.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			35	90.489.807		100.252.100	-	-	-	-	-	-	-	-	35	90.489.807	0,00%	0,00%	
1.5.1		6.01.01.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			18	80.289.807	18	60.842.100							-	-	18	80.289.807	0,00%	0,00%	
1.5.2		6.01.01.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			17	10.200.000	21	39.410.000							-	-	17	10.200.000	0,00%	0,00%	
1,7		6.01.01.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			27	271.599.339		298.291.200	-	70.409.965	-	54.502.565	-	-	-	-	124.912.530	27	396.511.869	0,00%	61,17%
1.7.1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	3.000.000	15	1.050.000				1.050.000			-	1.050.000	12	4.050.000	0,00%	100,00%	
1.7.2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	62.518.789	12	84.000.000		17.609.965		17.609.965			-	35.219.930	3	97.738.719	0,00%	41,93%	
1.7.3			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	206.080.550	24	213.241.200		52.800.000		35.842.600			-	88.642.600	12	294.723.150	0,00%	41,57%	

Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja			5	22.359.400		28.786.500	3	6.143.500	-	5.360.000	-	-	-	-	3	11.503.500	8	33.862.900	66,67%	57,17%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1	2.931.500	1	3.594.200	1	3.535.000							1	3.535.000	2	6.466.500	100,00%	98,35%	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yg disusun			2	5.504.200	2	5.714.900	2	2.608.500							2	2.608.500	4	8.112.700	100,00%	45,64%	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	13.923.700	3	19.477.400				5.360.000					-	5.360.000	2	19.283.700	0,00%	27,52%	
Rata- Rata Capaian Kinerja																	51,47%					
Predikat Kinerja																						

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Didalam tujuan dan sasaran Nasional yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024, diselaraskan dengan RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

Tabel 3.1
Keselarasan antara RPJMN RPD Provinsi Sumatera Utara dan RPD kabupaten Padang Lawas Utara

No	Sasaran RPJMN Tahun 2020-2024	RPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026		RPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026	
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Berkualitas dan Inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
			Keberlanjutan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		
			Meningkatnya pelayanan publik yang prima		
			Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur		
			Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Inovasi Daerah		

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan Rencana Pembanguna Daerah Kabupaten Padang Lawas utara tahun 2024-2026 adalah :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih dengan sasaran Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan yang Prima.
2. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Kualitas SDM yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Maju dengan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat
4. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya Inprastruktur Dasar
 - b. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026, pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024-2026 diharapkan dapat mewujudkan **“Pemerintahan yang Baik dan Bersih”** sesuai dengan tujuan ke 1(satu) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 Kabupaten Padang Lawas Utara, memaknai tujuan tersebut Inspektorat Kabupaten Memaknainya **““dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih akan terwujud kesejahteraan masyarakat”**. Oleh karena itu yang harus dilakukan Inspektorat adalah pengawallan melalui ***“Pengawasan Yang Profesional Dan Berfungsi Optimal”***

Pengawasan, Yang Profesional dan Berfungsi Optimal tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengawasan,

Yang dimaksud dengan pengawasan menurut Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan.

2. Profesional.

Yang dimaksudkan dengan profesional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur yang memiliki integritas, kompetensi dan kemampuan yang didukung dengan pengetahuan dan keterampilan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan terwujudnya pengawasan yang profesional diharapkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah dan mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara/daerah dan penyalahgunaan wewenang sedini mungkin.

3. Berfungsi Optimal.

Yang dimaksudkan dengan berfungsi optimal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas pemerintahan dan auditor diharapkan dapat berfungsi optimal dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif dan adil dalam menegakkan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran yang akan dicapai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam membantu mewujudkan tujuan tersebut, untuk Keperluan pengukuran tercapainya tujuan Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara diperlukan Sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024.

Tujuan Renja Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 adalah **“Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dibidang pengawasan”** dengan sasaran **‘Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Inspektorat Daerah’**. Kesesuaian Renstra Inspektorat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Keselarasan RPD dengan Renstra Inspektorat daerah

RPD		RENSTRA		
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	Program
Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan yang Prima	Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih bidang Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Inspektorat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan kabupaten/ Kota
				Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Program Pendampingan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Penetapan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara beserta indikator kinerjanya memberikan fokus pada penyusunan kegiatan,

sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Indikator tujuan/sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 3.2
TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE		
				1	2	3
1	2	3	4	7	8	9
1	Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dibidang pengawasan	Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Inspektorat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	67,67	72,67	77,67
			Indeks Kepuasan Masyarakat	78	80	82
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3
			Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3

Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2026. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu **“Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan di Inspektorat Daerah”**.

Sasaran strategis Inspektorat merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat pada tahun 2026 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari program teknis Inspektorat yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah”.

Penetapan sasaran strategis ini dimaksudkan untuk mendorong semua dapat mengimplementasikan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik, handal, akuntabel sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga terwujud opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penetapan sasaran strategis ini juga dimaksudkan untuk mendorong semua OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat **“membina penyelenggaraan SPIP yang efektif pada OPD”** secara kualitatif dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian tugas dan fungsi ini adalah adanya “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada OPD”.

Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2026. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada OPD”. Sasaran strategis meningkatnya maturitas SPIP pada OPD merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh OPD pada tahun 2026 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan SPIP terhadap OPD. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. Inspektorat menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP.

Tujuan penyelenggaraan SPIP pada OPD adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terkait

dengan upaya pencegahan korupsi, Inspektorat akan secara aktif menawarkan antara lain kegiatan *fraud control plan* dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran kualitatif pencapaian tugas dan fungsi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun 2016. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara”. Sasaran strategis Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada oleh Inspektorat merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP pada tahun 2026 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil(*outcome*) dari berbagai kegiatan pembinaan APIP.

Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Untuk dapat mengelola (*manage*) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. Inspektorat menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP.

Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian.

Peran tersebut sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

3.3. Program dan Kegiatan

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah kabupaten Padang Lawas Utara mengacu kepada program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara 2024-2026.

Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri No.90 Tahun 2019 Terkait dengan program ini maka program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu program dan kegiatan pada setiap OPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Urusan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten yaitu Urusan Pemerintahan Umum. Ringkasan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.4

Program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah OPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan

			Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau bangunan Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan Gedung Kantor

Tabel 3.5

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Pendampingan dan Asistensi

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
			Reviu Laporan Kinerja
			Reviu Laporan Keuangan
			Pengawasan Desa
			Kerjasama Pengawasan Internal
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan
			Perumusan Kebijakan Teknis dibidang fasilitasi Pengawasan
		Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Pendampingan,Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Berdasarkan pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan 3 program dengan 12 kegiatan dan 51 sub kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja (P.Renja) Tahun 2025
Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah				72,67 Nilai	72,67 Nilai	4.162.717.780,00	4.893.497.478,00	4.161.657.090,00	427.469.343,00							4.990.187.123,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selaras dan selesai lapat Waktu				100 Persen	100 Persen	29.250.800,00	29.250.800,00	31.125.000,00	1.874.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah		18.012.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	21.212.800,00	21.212.800,00	19.477.400,00	-1.735.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.443.800,00	4.443.800,00	8.053.400,00	3.609.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.506.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	3.594.200,00	3.594.200,00	3.594.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			2.506.300,00	INSPEKTORAT
	6	NON URUSAN							5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	
	6.01	URUSAN PEMERINTAHAN MELAKUKAN							5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	

6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00						5.517.093.323,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00						5.517.093.323,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					100 Persen	100 Persen	3.181.658.480,00	3.174.829.378,00	2.998.233.090,00	-183.425.390,00		Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah		3.698.877.023,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.036.840.780,00	2.962.331.678,00	2.966.335.390,00	-70.505.390,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		3.549.167.323,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					12 Dokumen	12 Dokumen	141.720.000,00	209.400.000,00	28.800.000,00	-112.920.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		146.640.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan	1 Laporan	3.097.700,00	3.097.700,00	3.097.700,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		3.069.700,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	[deleted] Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah					1 Keuangan	1 Keuangan	2.979.000,00	2.979.000,00	2.979.000,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah	3.069.700,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.979.000,00	2.979.000,00	2.979.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.069.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0 Kegiatan 100 Persen	0 Kegiatan 100 Persen	120.280.000,00	657.300.000,00	375.640.000,00	255.360.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah		86.000.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																				
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	120.280.000,00	657.300.000,00	375.640.000,00	255.360.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			86.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah				95 Persen	95 Persen	241.446.600,00	309.246.600,00	211.272.800,00	-30.173.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah		303.519.500,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	3.622.000,00	5.468.000,00	5.468.000,00	1.846.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			3.988.900,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	30.083.900,00	33.524.700,00	20.315.800,00	-9.768.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			42.715.300,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																				
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.482.100,00	12.403.300,00	7.584.600,00	-2.897.500,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			10.482.000,00	INSPEKTORAT

6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					3 Paket	3 Paket	17.540.000,00	18.050.000,00	18.050.000,00	510.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			18.212.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					6 Paket	6 Paket	25.508.000,00	59.520.000,00	29.760.000,00	4.252.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			18.971.900,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					3 Dokumen	3 Dokumen	24.090.000,00	48.180.000,00	24.090.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			23.440.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12 Laporan	12 Laporan	0,00	132.100.600,00	106.004.400,00	106.004.400,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DALU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			185.709.400,00	INSPEKTORAT
6	NON URUSAN								5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	
6.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	215.867.910,00							5.517.093.323,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	1 Laporan	69.384.600,00	202.173.400,00	93.863.900,00	24.479.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah		61.970.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					24 Unit	24 Unit	17.980.800,00	17.980.800,00	19.731.400,00	1.750.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		42.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	4 Unit	51.403.800,00	184.192.600,00	74.132.500,00	22.728.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		19.970.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100 Persen	100 Persen	300.241.200,00	300.241.200,00	298.291.200,00	-1.950.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah	314.411.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	1.050.000,00	-1.950.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		4.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	84.000.000,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		85.170.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					12 Laporan	12 Laporan	213.241.200,00	213.241.200,00	213.241.200,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		225.241.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah					1 Kegiatan 95 Persen	1 Kegiatan 95 Persen	217.477.100,00	217.477.100,00	150.252.100,00	-67.225.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah	104.327.100,00	INSPEKTORAT

6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					12 Unit	12 Unit	39.410.000,00	39.410.000,00	39.410.000,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		18.000.000,00	INSPEKTORAT
1.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan berdasarkan PKP/Non PKP1				95 Persen	95 Persen	1.072.738.500,00	1.476.310.700,00	1.155.855.800,00	-279.936.000,00						792.802.500,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Ketepatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Yang berlaku Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindak lanjutii undefiined				80 Persen 90 Persen undefiined	83 Persen 90 Persen undefiined	754.296.900,00	1.154.269.100,00	731.515.700,00	-22.781.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD Kabupaten Padang Lawas Utara	564.828.900,00	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	4 Laporan	99.084.200,00	114.427.300,00	59.068.500,00	-40.015.700,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			55.990.000,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				13 Laporan Laporan	45 Laporan Laporan	157.328.000,00	265.977.400,00	160.140.300,00	2.812.300,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			83.399.800,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				7 Laporan	7 Laporan	110.527.100,00	110.527.100,00	117.169.100,00	6.642.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			85.773.400,00	INSPEKTORAT	
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																			
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				8 Laporan	8 Laporan	91.464.700,00	91.464.700,00	95.064.700,00	3.600.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			77.299.700,00	INSPEKTORAT	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Diusun</i>				2 Rekomen dasi	2 Rekomen dasi	6.371.800,00	6.371.800,00	6.371.800,00	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	- -			20.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	<i>Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				100 Persen	100 Persen	247.582.600,00	688.637.700,00	381.393.900,00	133.811.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD Kabupaten Padang Lawas Utara		91.603.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				42 perangkat daerah	42 perangkat daerah	51.670.800,00	282.544.700,00	145.297.900,00	93.627.100,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			22.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	22.500.000,00	159.198.700,00	87.958.600,00	65.458.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			22.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				3 Kegiatan	3 Kegiatan	41.791.800,00	190.003.500,00	83.733.400,00	41.941.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			31.603.700,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				10 perangkat daerah	1 perangkat daerah	131.620.000,00	56.890.800,00	64.404.000,00	-67.216.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan brokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			15.000.000,00	INSPEKTORAT
			J U M L A H						5.493.538.280,00	7.068.945.278,00	5.709.406.190,00	177.088.576.008,00							5.517.093.323,00	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja perubahan Inspektorat Tahun Anggaran 2025 merupakan sebuah gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran Inspektorat dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penyusunan serta penetapan program dan kegiatan dalam Perubahan rencana Kerja 2025 untuk mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perubahan, Perubahan rancangan Renja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Daerah kabupaten Padang Lawas Utara di bidang Pengawasan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang, dan dengan ditetapkannya Perubahan rencana Kerja Inspektorat daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara dapat berjalan dengan baik.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Gunungtua, 28 Juli 2025

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


Ir. HENDRA HASAN SALEH SIREGAR, ST, MM
PEMBINA
NIP. 19821204201001 10 22